RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024

KOTA TARAKAN
2024

Daftar Isi

Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA TARAKAN	32
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V	PENUTUP	58

Daftar Tabel

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kota Tarakan s/d Tahun 2023 12

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan 18

Tabel 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Tarakan 24

Tabel 4 52 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Tarakan 42

Tabel 5 Rencan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Penanamn Modal dan PTSP Kota Tarakan Tahun 2024 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019-2024 DPMPTSP Kota Tarakan sehingga penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan berpedoman pada Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung Pemerintah Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Tarakan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tarakan;
2. RENJA DPMPTSP merupakan acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan untuk memasukan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024;
3. RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan;

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kota Tarakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Walikota Tarakan nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 458);
22. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

23. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 518/HK- XII/551/2022 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dan perencanaan Jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Perubahan

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan tahun 2024 adalah :

a. Menjabarkan arahan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan Tahun 2019-2024 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Tahun 2024.

b. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kota Tarakan dengan perencanaan OPD, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kota Tarakan dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan tahun 2024 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Kota Tarakan .

c. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 2024 dan DPA OPD Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Kota Tarakan.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Kota Tarakan Tahun 2024

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP mendasarkan pada pelaksanaan Renja Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan pada Program 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) kegiatan sesuai DPA 2023, dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP , serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan perkiraan pelaksanaan DPA-Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP disajikan pada Tabel II.A.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2023.

Adapun pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan tahun 2024 pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat dari pelaksanaan Renja tahun 2022 mencapai 237,24 %.

Realisasi program dan kegiatan Renja pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pencapaian Renja 100%
b. Program Promosi Penanaman Modal pencapaian Renja 100%
c. Program Pelayanan Penanaman Modal pencapaian Renja 104,19%

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pencapaian Renja 782%

e. Program Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pencapaian Renja 100%

Review Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022:

1. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target yang direncanakan

   Dari 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang telah direncanakan terdapat 3 (tiga) program dan 8 (delapan) realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100 % terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya:

      1) Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan capaian 100 %;

      2) Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan capaian 100 %;

      3) Administrasi umum perangkat daerah dengan capaian 100%;

      4) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian 100%;

      5) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian 100%;

      6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian 100%.

   b. Program Promosi Penanaman Modal dengan capaian 100 % terdiri dari 1 kegiatan:

      1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100%.

   c. Program Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100% yang terdiri dari 1 kegiatan:

1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100%.

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Secara keseluruhan program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan mencapai 100 % bahkan terdapat 2 Program melebihi dari target yang ditentukan yaitu:

   1) Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari kegiatan dengan capaian 104,19% merupakan capaian indikator Survey IKM dari target 86 (B) dengan realisasi 89,6 (A) terdiri dari 1 kegiatan:

      - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4 layanan yang secara keseluruhan sub kegiatan terlaksana 100%.

   2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian 782 % Realisasi Investasi di kota tarakan dari target realisasi 650 M dengan capaian 5.083 T, terdiri dari 1 kegiatan:

      - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100%.

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMPTSP sampai dengan tahun 2023

Dari 5 (lima) program dan 10 kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan, perkiraan realisasi program/kegiatan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah 100 % terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya:

   a. Administrasi keuangan peringkat daerah dengan target renja 2 layanan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 6 layanan (45,15 %) sampai dengan Tahun 2023;

b. Administrasi umum perangkat daerah dengan target renja 6 layanan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 9 layanan (30%) sampai dengan Tahun 2023;

c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target renja 5 layanan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 13 layanan (52%) sampai dengan Tahun 2023

d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target Renja 30 aset dan perkiraan realisasi capaian target renstra 126 aset (165,79%) sampai dengan Tahun 2023;

e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target renja 4 layanan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 10 layanan (55,56%) sampai dengan Tahun 2023;

f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target renja 52 aset dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 84 aset (39,07%) sampai dengan Tahun 2023.

2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah 100 %, terdiri dari 1 kegiatan:

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan dengan target renja 1 dokumen dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 2 dokumen (25%) sampai dengan Tahun 2023;

3) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator Survey IKM 87(B) dengan perkiraan realisasi 87 kategori B (98,86%) sampai dengan Tahun 2023 terdiri dari 1 kegiatan:

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target renja 4 layanan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 11 layanan (57,89%) sampai dengan Tahun 2023.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target capaian 750 miliar dari realisasi investasi di kota Tarakan terdiri yang dari 1 kegiatan :

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target renja 3

layanan dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 8 layanan (61,54%) sampai dengan Tahun 2023;

5) Program Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100% yang terdiri dari 1 kegiatan:

   a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target renja 48 dokumen dan perkiraan realisasi capaian target renstra adalah 98 dokumen (40,83%) sampai dengan Tahun 2023.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Terdapat 2 program/kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu:

1) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan pencapaian Renja dari target 86 B dengan capaian 89,6 A dengan capaian 104,19 % hal ini disebabkan karena pelaksanaan survey dilaksanakan 2 kali dalam setahun, dan bertahap telah dilakukan berbagai perbaikan setiap tahunnya, secara keseluruhan unsur yang dinilai telah memenuhi target namun masih terdapat 2 prioritas rekomendasi dari pelaksanaan survey diantaranya perbaikan unsur Kesesuaian Persyaratan dan unsur Kualitas Sarana dan Prasarana.

2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan dengan pencapaian Renja dari target realisasi 650 M dengan capaian 5.083 T capaian 782 %. Capaian ini disebabkan terjadinya lonjakan peningkatan realisasi investasi di tahun 2022, karena adanya peningkatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal/ pendampingan pengisian LKPM melalui aplikasi *online*; dan terlaksananya pengendalian Penanaman Modal melalui Pembinaan (sosialisasi kepada pelaku usaha) dan Pengawasan Penanaman Modal (kunjungan langsung ke Perusahaan); serta adanya peningkatan realisasi dari PT. Phoenix Resources International yang bergerak dibidang Industri Kertas sebesar 4.4 triliun rupiah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPMPTSP.

Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan faktor-faktor tersebut

1) Penyesuaian target capaian pada tahun 2023;
2) Mempercepat pelaksanaan fisik pekerjaan.

Karena adanya perbedaan indikator sub kegiatan, sehingga untuk capaian target sub kegiatan 2023 dikosongkan. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Pencapaian Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2023 disajikan dengan format tabel 1:

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kota Tarakan s/d Tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		
											Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5			Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Realisasi	Satuan		Target	Satuan	Realisasi	Satuan	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)		(11)
2	18	1			**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00	100	%	100	%	100.00
2	18	1	2.02		**Administrasi keuangan peringkat daerah**	**Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	13	Layanan	2	Layanan	2	Layanan	2	Layanan	100.00	2	Layanan	6	Layanan	46.15
2	18	1	2.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	2870	OB	504	OB	42	OB	42	OB	100.00					-
2	18	1	2.02	2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	360	OB	72	OB	12	OB	12	OB	100.00					-
2	18	1	2.05		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian**	10	Layanan	1	Layanan	1	Layanan	1	Layanan	100.00	1	Layanan	3	Layanan	30.00
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tupoksi	6	orang	0	OP	2	OP	2	OP	100.00					-
2	18	1	2.06		**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana**	25	Layanan	4	Layanan	4	Layanan	4	Layanan	100.00	5	Layanan	13	Layanan	52.00
2	18	1	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	12	jenis	3	jenis	4	jenis	4	jenis	100.00					-
2	18	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan kebersihan yang tersedia	131	jenis	29	jenis	3	jenis	3	jenis	100.00					-
						Jumlah jenis ATK yang tersedia	203	jenis	35	jenis	34	jenis	34	jenis	100.00					-

2	18	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	4	jenis	1	jenis	1	jenis	1	jenis	100.00			-
						Jumlah penggandaan yang tersedia	200	lembar		lembar		lembar		lembar				-
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	23	OP	3	OP	1	OP	1	OP	100.00			-
2	18	1	2.07		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah aset/BMD yang diadakan**	76	aset	18	aset	78	aset	78	aset	100.00	30	aset	126	aset	165.79
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	139	unit			63	unit	63	unit	100.00					-
2	18	1	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	35	jenis	18	jenis	15	jenis	15	jenis	100.00					-
2	18	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15	jenis												-
2	18	1	2.08		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah layananan jasa penunjang yang tersedia**	18	Layanan	3	Layanan	3	Layanan	3	Layanan	100.00	4	Layanan	10	Layanan	55.56
2	18	1	2.08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, perangko dan paket pengiriman yang tersedia	789	lembar	150	lembar	150	lembar	150	lembar	100.00					-
2	18	1	2.08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100.00					-
2	18	1	2.08	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah cakupan layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	12	bulan	3	bulan	3	bulan	100.00					-
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa umum perkantoran	6	kegiatan												-
2	18	1	2.09		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah aset/BMD yang dipelihara**	215	aset	16	aset	16	aset	16	aset	100.00	52	Aset	84	Aset	39.07

2	18	1	2.09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pajak dan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terselenggara	65	unit	12	unit	10	unit	10	unit	100.00			-
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terselenggara	84	unit	6	unit	6	unit	6	unit	100.00			-
						Jumlah kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terselenggara	378	kegiatan	36	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00			-
						Jumlah BBM kendaraan operasional	14016	liter	2,712	liter	2005.59	liter	2005.59	liter	100.00			-
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	6	kegiatan	3	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	100.00			-
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24	jenis		jenis		jenis		jenis				-
2	18	2			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan**	9.64	%	100	%	0	%	0	%		100	%	100 %	1,037.34
2	18	2	2.01		**Penetapan Pemberiaan Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen kebijakan yang ditetapkan dan laporan investasi yang di evaluasi**	8	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	dokumen		1	dokumen	2 dokumen	25.00
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberiaan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	3	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	dokumen				-
2	18	2	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen peta potensi investasi daerah yang tersusun**	9	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	dokumen			dokumen	dokumen	-

2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum penanaman modal	4	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	dokumen				-
2	18	3			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase kegiatan promosi penanaman modal**	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00	100	%	100	%	100.00
2	18	3	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal**	13	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	100.00	2	keg	6	keg	46.15
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah strategi promosi penanaman modal yang tersusun	5	keg	1	keg	0	keg	0	keg						-
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	8	keg	2	keg	2	keg	2	keg	100.00					-
2	18	4			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Nilai IKM**	88	B	88	B	86	B	89.6	A	104.19	87	B	87	B	98.86
2	18	4	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang tersedia**	19	Layanan	3	Layanan	4	Layanan	4	Layanan	100.00	4	Layanan	11	Layanan	57.89
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan secara elektronik yang disusun	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					-
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang dipantau	20500	izin	8348	izin	4500	izin	9886	izin	219.69					-
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	4	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100.00					-
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	3	keg	0	keg	1	keg	1	keg	100.00					-
2	18	5			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Nilai realisasi investasi Kota Tarakan**	Rp .860	M	Rp .574	M	Rp .650	M	Rp 5.083	T	782.00	Rp .745	M	Rp .745	M	86.63

2	18	5	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai realisasi investasi Kota Tarakan**	13	layanan	3	Layanan	2	Layanan	2	Layanan	100.00	3	Layanan	8	Layanan	61.54
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau	217	perusahaan	4	perusahaan	0	perusahaan	0	perusahaan						-
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina	308	perusahaan	3	perusahaan	220	perusahaan	220	perusahaan	100.00					-
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	165	perusahaan	18	perusahaan	8	perusahaan	8	perusahaan	100.00					-
2	18	6			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola**	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00	100	%	100	%	100.00
2	18	6	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	240	dokumen	48	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100.00	48	dokumen	98	dokumen	40.83
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	240	dokumen	48	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100.00					-

2.2. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sampai dengan tahun 2023

a. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman modal dan PTSP pada tahun 2022 diukur melalui beberapa parameter yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, pada tahun 2022 capaian IKK sebesar 782 % yang merupakan penetapan target berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024, dari target realisasi 650 milyar dengan capaian 5.083 triliun, capaian ini disebabkan terjadinya lonjakan peningkatan realisasi investasi di tahun 2022.

Capaian Realisasi Investasi Kab/Kota Melebihi Dari 100 %,

1. Dasar Penetapan Target:
   a. Trend realisasi investasi di Kota Tarakan dalam 5 Tahun terakhir dimana tidak pernah lebih dari 600 milyar rupiah;
   b. Target realisasi investasi Kota Tarakan Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hanya Rp. 162 milyar rupiah.
2. Peningkatan Realisasi Investasi tahun 2022 yang melebihi target dikarenakan
   a. Peningkatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha di Kota Tarakan yang merupakan *outcome* dari Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal melalui Pembinaan Penanaman Modal (sosialisasi kepada Pelaku Usaha) dan Pengawasan Penanaman Modal langsung ke beberapa perusahaan yang dilaksanakan oleh DPM-PTSP Kota Tarakan;
   b. Adanya percepatan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 4.4 triliun rupiah dari PT. Phoenix Resources International.

Dasar hukum penerapan IKU pada DPM-PTSP Kota Tarakan adalah peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah.

Data IKU Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan dapat dilihat di Tabel berikut:

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase penyelenggaraan layanan DPMPTSP	%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai IKM	Nilai			86 B	86 B	87 B	88 B	89,60 A	87 B	88 B	Realisasi capaian berdasarkan hasil IKM semt.2 Th 2022
3	Nilai Investasi berskla Nasional (PMA/PMDN)	Rupiah			Rp 1,575 T	Rp 1,825 T	Rp 2,075 T	Rp 2,275 T	Rp 2.851 T	Rp 3,097 T	Rp 3,297 T	Perhitungan capaian realisasi 2022 merupakan akumulasi capaian tahun 2021 ditambah peningkatan nilai investasi tahun 2022 dan proyeksi 2023-2024 berdasarkan kenaikan realisasi Investasi di tahun 2022
4	Jumlah Investor berskla Nasional (PMA/PMDN)	Investor			4,500	5,900	6,300	6,400	6,743	6,300	6,400	Perhitungan capaian realisasi 2022 berdasarkan data dari OSS RBA , adapun proyeksi 2023-2024 berdasarkan Target pada Renstra
5	Rasio daya serap tenaga kerja	Tenaga Kerja			5 T.Kerja	5 T.Kerja	5 T.Kerja	5 T.Kerja	3 T.Kerja	5 T.Kerja	5 T.Kerja	Perhitungan Capaian realisasi 2022 belum seluruhnya memasuki tahadap pekerjaan konstruksi hingga produksi dan dapat dikatakan belum adanya penyerapan peluang tenaga kerja yang banyak, adapun proyeksi 2023-2024 berdasarkan Target pada Renstra
6	Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan	%		√	130.96 %	13.17%	14.62%	15.44 %	785%	10.62%	15.44%	Perhitungan capaian realisasi 2022,dan proyeksi 2023-2024 berdasarkan tren kenaikan tahun 2020 ke 2021 namun di tahun 2022 terdapat capaian realisasi pada salah satu perusahaan PMA yg telah melebihi dr Target yang telah di rencanakan.

c. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan dalam menyelenggarakan tugas pokok yaitu membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota Tarakan.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 74. Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengintegrasikan Penanaman Modal dengan PTSP, dimana kedudukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menyelenggarakan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).*

OSS RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP. 5/2021). Beda dengan sistem OSS 1.1 yang tidak mendasarkan perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, sistem *OSS RBA* ini nantinya akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2021 pasal 7 ayat 2, dengan capaian kinerja atas sasaran ini mengacu pada Peraturan Wali kota Tarakan Nomor 188.4/HK-IX/406/2022 tentang Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Non Perizinan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

   Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dapat permasalahan-permasalah mendasar yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

   Pada tataran kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

   1) percepatan sarana prasarana/rehabilitasi gedung kantor untuk memaksimalkan ruang gerak Dinas Penanaman Modal dan PTSP khususnya pada Mal Pelayanan Publik;
   2) menetapkan regulasi teknis di bidang penanaman modal dan perizinan untuk lebih menjamin iklim investasi (belum adanya peraturan RUPM Penanaman Modal Kota Tarakan);
   3) belum optimalnya pemetaan potensi dan peluang investasi (belum adanya Peraturan pemberian fasilitas/insentif Penanaman Modal);
   4) belum maksimalnya evaluasi perbaikan dan penyempurnaan SP-SOP khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan;
   5) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur belum memadai;
   6) belum optimalnya promosi dan fasilitas investasi penanaman modal;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional

   Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan yang menjadi tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Misi II dan Misi IV sebagai berikut :

   Misi II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.

   Misi IV : Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.

Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi dasar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan dalam mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas yang tertuang pada RPJMD Kota Tarakan. Dalam hal ini berdampak pada peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah dan Peningkatan Kemudahan Investasi yang menjadi arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan terhadap masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui program/ kegiatan/sub kegiatan dan secara keseluruhan akan mendongkrak Peningkatan Kemudahan untuk meningkatkan realisasi Investasi di Kota Tarakan.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Tarakan

   Tantangan yang menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan yaitu dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan investasi; peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban, peningkatan penyelesaian permasalahan perusahaan, peningkatan promosi investasi dan peningkatan pelayan perizinan dan non perizinan sesuai kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal sehingga kemudahan berinvestasi dapat terealisasi sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Tarakan.
   Dengan dukungan yang tinggi dari Kepala Daerah dalam hal kemudahan berinvestasi adapun peluang yang ada di kota Tarakan pada saat ini dalam pengembangan penanaman modal antara lain :

   1) Peluang bisnis di sektor Perdagangan;
   2) Peluang bisnis di sektor Pariwisata;
   3) Peluang bisnis di sektor Perikanan; dan
   4) Peluang bisnis di sektor Digital.

   Hal ini dikarenakan dengan terjalinnya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara komponen (stakeholder) yang terkait dengan penanaman modal dan sesuai dengan visi Wali Kota Tarakan.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan analisis fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2024, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3) Program Promosi Penanaman Modal;
4) Program Pelayanan Penanaman modal;
5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Terdapat beberapa Isu Strategis yang saat ini harus diperhatikan, yaitu:

1) Percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2) Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan PMDN;
3) Terintegrasinya regulasi di bidang penanaman modal dan perizinan dan nonperizinan
4) Sarana untuk menarik minat investor;

d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2024.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dari rancangan awal RKPD terhadap hasil

analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan.

Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kota Tarakan Tahun 2024, sedangkan program dan kegiatan hasil analisis kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan, isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya. Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yaitu:

secara lengkap terdapat pada lampirkan tabel berikut, Tabel 3. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 berikut:

Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 Kota Tarakan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Rancangan Awal RKPD 2024	Hasil Analisis Kebutuhan 2024			
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
(1)													
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP													
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP													
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			6,783,346,000				7,837,289,422	
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	5,635,232,328	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6,687,775,750	
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 Dokumen	5,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia				
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	3 Layanan	4,468,170,813	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2	layanan	5,150,446,000	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	4,419,484,813	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	OB	5,014,000,000	Pagu berdasarkan DPA TA 2023

2	18	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	43,686,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	136,446,000	Pagu berdasarkan DPA TA 2023
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	3 Layanan	48,000,000	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	2	layanan	86,800,000	
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	21,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			25,800,000	
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	18,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	OP	61,000,000	
2	18	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	9,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	176,581,900	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5	Layanan	219,265,100	
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5,984,000	
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	149,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	181,878,450	
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3,171,100	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3,200,000	
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2,000,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	Laporan	3,412,450.000	

2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	20,410,800	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	24,790,200	menyesuaikan harga satuan pada SIPD dan kebutuhan kegiatan koordinasi Kadis
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	14 Aset	130,000,000	Jumlah aset/BMD yang diadakan	60	Aset	379,522,000	
2	18	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	30,000,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	30,000,000	
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	20,000,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	unit	81,372,000	
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20,000,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26		51,150,000	
2	18	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	60,000,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit	217,000,000	
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	4 Layanan	422,500,000	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	4	layanan	429,500,000	
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1,500,000	
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	380,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	380,000,000	

2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	45,000,000	
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3,000,000	
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	60 Aset	384,979,615	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	57	aseet	422,242,650	
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	7,500,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	unit	7,500,000	
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	52,479,615	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	unit	89,742,650	
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	275,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	unit	275,000,000	
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	unit		
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	25,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	38	unit	50,000,000	

2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan	9.64 %	83,000,000	Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan	10.26	9.64 %	83,000,000	
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan yang ditetapkan dan laporan investasi yang dievaluasi	3 Dokumen	40,000,000	Jumlah dokumen kebijakan yang ditetapkan dan laporan investasi yang dievaluasi	1	Dokumen	40,000,000	
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	20,000,000	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	40,000,000	
2	18	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	5 Kegiatan Usaha	20,000,000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0		0	
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi Invetasi Daerah yang tersusun	3 Dokumen	43,000,000	Jumlah dokumen Peta Potensi Invetasi Daerah yang tersusun	2	Dokumen	43,000,000	
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	20,000,000	Perwali RUPM
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	23,000,000	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	23,000,000	
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal	100 %	323,000,000	Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal	100	%	323,000,000	

2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan promosi Penanaman modal	4 Kegiatan	323,000,000	Jumlah Penyelenggaraan promosi Penanaman modal	4	Kegiatan	323,000,000	
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23,000,000	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	23,000,000	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	Dokumen	300,000,000	
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	88 B .	340,000,000	Nilai IKM		88 B	341,400,000	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	4 Layanan	340,000,000	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	4	layanan	341,400,000	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha	115,000,000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			115,000,000	
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1500 kegiatan usaha	140,000,000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1,500	kegiatan usaha	140,000,000	

2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (konsultasi)	413 Orang	70,000,000	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (konsultasi)			71,400,000	-1,400,000
						Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (pengaduan)	6 Orang						
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah)	Rp 860 M	360,000,000	Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah)	Rp 860 M	M	360,000,000	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3 Layanan	360,000,000	Jumlah layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3	Layanan	360,000,000	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	70 Kegiatan Usaha	60,000,000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	70	Kegiatan Usaha	60,000,000	
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	120 Pelaku Usaha	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	120	Pelaku Usaha	200,000,000	

2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50 Kegiatan Usaha	100,000,000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50	Kegiatan Usaha	100,000,000	
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	100 %	42,113,672	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	100	%	42,113,672	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	48 Dokumen	42,113,672	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	48	Dokumen	42,113,672	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	48 Dokumen	42,113,672	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	48	Dokumen	42,113,672	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA TARAKAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan. Perencanaan Rencana Kerja tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan capaian yang optimal yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu keterkaitan tersebut dijelaskan dibawah ini.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,”

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 dijabarkan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yakni

PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Selaras dengan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan pada Kementerian Investasi 2020-2024 yang mengarah, terdapat 2 Pilar utama :

1. Pilar Pertama, Inovasi Investasi 2020-2024

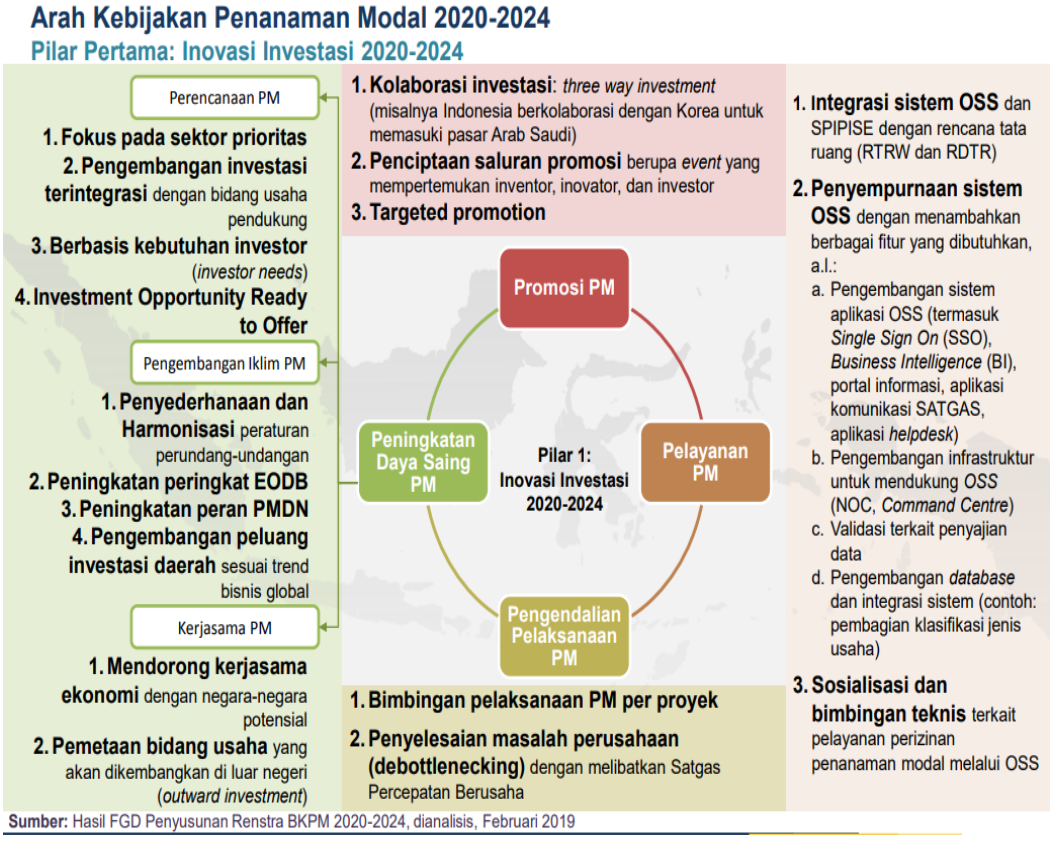

Sumber: Hasil FGD Penyusunan Renstra BKPM 2020-2024, dianalisis, Februari 2019

2. Pilar Kedua, Kualitas Investasi 2020-2024

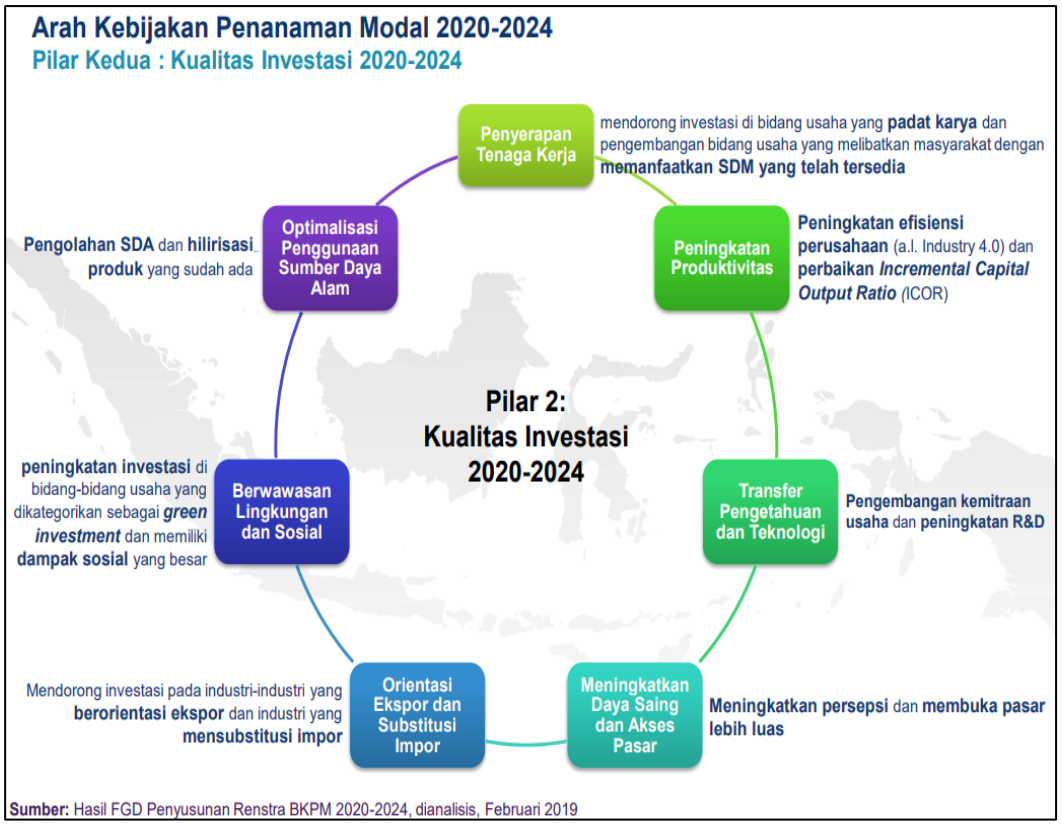

Hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Ta. 2024 antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Daerah Kota Tarakan menyepakati:

INDIKATOR	TARGET	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
Nilai Realisasi Penanaman Modal	1.293	Rp	5.082 T	745 M	850 M

Adapun telaahan atas kebijakan dari Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam RPJMD yang dirumuskan RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 yaitu memfokuskan pada peningkatan keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggulan daerah yang hal ini selaras dengan tema rencana kerja Pemerintah Pusat 2024 yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Wali Kota Tarakan . Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan Kota Tarakan yang terkait dengan yaitu

Misi 1 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.

Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat (Ekonomi Pro-Rakyat) Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, dan Pertanian dalam Arti Luas.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

PRIORITAS NASIONAL 1	**"MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERKEADILAN"**		
Visi :	**" TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY'**		
Misi II:	**Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.**		
Misi IV:	**Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat (Ekonomi Pro-Rakyat) Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, dan Pertanian dalam Arti Luas.**		
Tujuan	**Sasaran PD**	**Indikator Sasaran**	**Target Sasaran DPMPTSP Tahun 2024**
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan Pelayanan dan administrasi	Meningkatnya Akuntabilitas DPMPTSP	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pelayanan dan administrasi	100%
Meningkatkan minat inverstor berinvestasi di Kota Tarakan	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Tarakan	Nilai IKM	88 (B)
		Jumlah Investor bersekala Nasional (PMDN)	6.400
		Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN)	3.347 T
		Rasio daya serap tenaga kerja	5 Tenaga Kerja
		Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan	15,44%

3.3. Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Selaras dengan tujuan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan mendukung secara penuh pada RPJMD kota Tarakan pada tujuan dari misi ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat yaitu menjawab Sasaran ke 4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, yang menjawab pada tujuan pertama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan untuk tujuan ke dua Dinas Penanaman Modal dan PTSP ada pada misi ke 4 (empat) yaitu Mengembangkan Ekonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, dan Pertanian Dalam Arti Luas, yang menjawab sasaran ke 14 RPJMD yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan Indikator Laju pertumbuhan ekonomi Rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, dan Pertanian Dalam Arti Luas, yang menjawab sasaran ke 14 RPJMD yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan Indikator Laju pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka setiap sasaran ditetapkan sasaran indikator yang akan menjadi target pencapaian misi kepala daerah.

Dari satu tujuan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan, telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) sasaran indikator secara keseluruhan memerlukan dukungan dari pemerintah kota.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2024, antara lain meliputi:

- Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2019-2024, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan, isu-isu penting yang berkaitan dengan bidang lingkungan, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan di tahun 2024 adalah sebanyak 6 (enam) program dengan 12 (dua belas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, dengan 6 (enam) kegiatan :

  1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
     - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
     - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
     - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
     - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
     - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
     - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
     - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
     - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
     - Pengadaan Mebel;
     - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
     - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan; Pemerintahan Daerah;
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) dokumen;

1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
   - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
   - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;

Program Promosi Penanaman Modal, dengan 1 (satu) kegiatan:

1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
   - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
   - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pelayanan Penanaman modal, dengan 1(satu) kegiatan:

1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:
   - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
   - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
   - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan 1 (satu) kegiatan:

1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan 1 (satu) kegiatan :

1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
   - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

c. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, secara keseluruhan berada di Kota Tarakan;

d. Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 7.848.542.822,- yang dirinci menurut sumber pendanaannya (tabel 5).

e. Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan dengan rancangan awal RKPD sudah sesuai, akan tetapi ada perbedaan target dan pagu indikatif, yang detailnya terdapat pada Tabel 5.

f. Terdapat 10 sub kegiatan yang mengalami perubahan nomenklatur dan indikator sebagai berikut:

Perubahan Penamaan Sub Kegiatan dan Indikator
Pasca Pemutakhiran Nomenklatur Kepmendagri no 900.1.15.5-1317

NO	SEBELUM		SESUDAH	
	Sub Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota
3	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)
4	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)
5	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang)	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Kegiatan Usaha)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)

7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha.)	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)
10	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)

TABEL 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Tarakan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7,848,542,822.00**				**0.00**
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**7,848,542,822.00**				**0.00**
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)***		***100***	**6,699,029,150.00**				**0.00**
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia (Dokumen)*		*1*	-				-
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*1*	-	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-

	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu (Layanan)*	*(KOTA TARAKAN)*	*2*	5.150.446.000,00			*0*	-
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*42*	5.014.000.000,00 *5.014.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*0.00*	-
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*12*	136.446.000,00 *136.446.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian (Layanan)*	*(KOTA TARAKAN)*	*2*	86.800.000,00			*0*	-
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*1*	25.800.000,00 *25.800.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*2*	61.000.000,00 *61.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana (Layanan)*		*5.*	219.265.100,00				-
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	5.984.000,00 *5.984.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*3*	181.878.450,00 *181.878.450,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-

	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*1*	3.200.000,00 *3.200.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*0.00*	-
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*3*	3.412.450,00 *3.412.450,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*0.00*	-
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*3*	24.790.200,00 *24.790.200,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah aset/BMD yang diadakan (Unit)*	*(KOTA TARAKAN)*	*60*	390,775,400.00			*0*	-
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*		*1*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	*(KOTA TARAKAN)*	*21*	81.372.000,00 *81.372.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*0.00*	-
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*26*	51.150.000,00 *51.150.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*0.00*	-
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*13*	228.253.400,00 228.253.400,00	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*0.00*	-
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia (Layanan)*		*4*	429.500.000,00				-

	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*12*	1.500.000,00 *1.500.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12*	380.000.000,00 *380.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	3.000.000,00 *3.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah aset/BMD yang dipelihara (Unit)*	*(KOTA TARAKAN)*	*57*	422.242.650,00			*0*	-
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*12*	7.500.000,00 *7.500.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*6*	89.742.650,00 *89.742.650,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1*	275.000.000,00 *275.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1*	-	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-

	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	*(KOTA TARAKAN)*	*38*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*0.00*	-
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Persentase Peningkatan Rencana Investasi Kota Tarakan (Persentase)***		***9.64***	**83,000,000.00**				**0.00**
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen kebijakan yang ditetapkan dan laporan investasi yang dievaluasi (Dokumen)*	*(KOTA TARAKAN)*	*1*	40.000.000,00			*0*	-
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)*		*1*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Daerah yang tersusun (Dokumen)*	*(KOTA TARAKAN)*	*2*	43.000.000,00			*0*	-
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*1*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*1*	23.000.000,00 *23.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*0.00*	-
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal (%)***		***100***	**323,000,000.00**				**0.00**

	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelenggaraan promosi Penanaman modal (Kegiatan)*		*4*	323.000.000,00				-
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*3*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)*		*1*	23.000.000,00 *23.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu) (Nilai)***		***88 B***	**341,400,000.00**				**0.00**
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang tersedia (Layanan)*		*4*	341.400.000,00				-
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	*Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*2*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*0.00*	-
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)*		*4000*	115.000.000,00 *115.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)*		*413*	71.400.000,00 *71.400.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-

	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)*		*1500*	140.000.000,00 *140.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (M)***		***860***	**360,000,000.00**				**0.00**
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Layanan)*		*3*	360.000.000,00				-
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)*		*70*	60.000.000,00 *60.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			-
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)*		*120*	200.000.000,00 *200.000.000,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			-
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)*		*50*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			-

6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola (%)***		***100***	**42,113,672.00**				**0.00**
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola (Dokumen)*		*48*	42.113.672,00				-
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)*		*48*	42.113.672,00 *42.113.672,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-
	J U M L A H					**7,848,542,822.00**				-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA TARAKAN

4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Renja 2024
Dengan 6 (enam) Program 13 (tiga belas) kegiatan, adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan di arah pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 6.699.029.150,- dengan indikator program Presentasi Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi, target 100 %.

b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Kegiatan diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya melalui Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan total pagu anggaran Rp.83.00.000,- dengan indikator program Persentase Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan, target 9,64 %.

c. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota total pagu anggaran Rp.323,000.000,- dengan indikator program Presentasi kegiatan Promosi Penanaman Modal target kinerja 100%.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Kegiatan diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan total pagu anggaran Rp. 341,400,000,- dengan indikator program nilai IKM target 88 (B).

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

Kegiatan diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan total pagu anggaran Rp. 360.000.000,- dengan indikator program Nilai realisasi investasi Kota Tarakan, target Rp. 860 M (15,44%).

f. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal,

Kegiatan diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan total pagu anggaran Rp. 42.113.672,- dengan indikator program Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola target 100%.

4.2 Pendanaan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan telah disertai target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2024, selanjutnya dijabarkan ke dalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan DPMPTSP kota Tarakan tahun 2024 teruang pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 5 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024			Unit Kerja PD Penanggung Jawab (Bidang)
		1	2	3	4	5			Target	Satuan	Rp	
-1	-2	-3					-4	-5	-6		-7	-8
		Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP										
		Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP										
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
		2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7,848,542,822	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan DPMPTSP								Persentase penyelenggaraan layanan DPMPTSP	100	%		
	Meningkatnya Akuntabilitas DPMPTSP							Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu	100	%		Sekretariat
		2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	6,699,029,150	
		2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2	Layanan	5,150.446,000	
		2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	OB	5,014,000,000	
		2	18	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	136,446,000	
		2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	2	Layanan	86,800,000	
		2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	25,800,000	
		2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	OP	61,000,000	

		2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5	Layanan	219,265,100	
		2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	25,984,000	
		2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	181,878,000	
		2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3,200,000	
		2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	Laporan	3,412,000	
		2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	24,790,000	
		2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	60	Aset	390,775,400	
		2	18	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan	1	Unit	30,000,000	
		2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	Unit	81,372,000	
		2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26	Unit	51,150,000	
		2	18	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	Unit	228,253,400	
		2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	4	Layanan	429,500,000	
		2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1,500,000	
		2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	380,000,000	
		2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	45,000,000	
		2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3,000,000	

		2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	57	Aset	442,242,000	
		2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	7,500,000	
		2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	38,89,742,650	
		2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	275,000,000	
		2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unit	0	
		2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38	unit	50,000,000	
Meningkatnya nilai investasi di Kota Tarakan								Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan	15,44	%		
	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Tarakan							Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp 3,297	T		Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan	9,64	%	83,000,000	
		2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan yang ditetapkan dan laporan investasi yang dievaluasi	1	Dokumen	40,000,000	
		2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	40,000,000	

		2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi Invetasi Daerah yang tersusun	2	Dokumen	43,000,000	
		2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	20,000,000	
		2	18	2	2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	23,000,000	
	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Tarakan							Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	6,400	Investor		Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal	100	%	323,000,000	
		2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan promosi Penanaman modal	4	Kegiatan	323,000,000	
		2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	Dokumen	300,000,000	
		2	18	3	2.01	3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	Dokumen	23,000,000	
	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Tarakan							Nilai IKM	88	B		Bidang Layanan Konsultasi dan Pengelola Pengaduan, Data dan Sistem Informasi; Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
		2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	88	B	341.400.000	
		2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	4	Layanan	344.966.000	

		2	18	4	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	15,000,000	
		2	18	4	2.01	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4,000	Pelaku Usaha	115.000,000	
		2	18	4	2.01	7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	413	Orang	71,400,000	
		2	18	4	2.01	8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1500	Pelaku Usaha	140,000,000	
	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Tarakan							Rasio daya serap tenaga kerja	5	T. Kerja		Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
								Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan	15,44	%		
		2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi Kota Tarakan	860	M	360.000,000	
		2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3	Layanan	360.000,000	
		2	18	5	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	70	Kegiatan Usaha	60.000,000	
		2	18	5	2.01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120	Pelaku usaha	200.000,000	

		2	18	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50	Kegiatan Usaha	100.000,000	
		2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	100	%	42.113.672	
		2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	48	Dokumen	42.113.672	
		2	18	6	2.01	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	48	Dokumen	42.113.672	

BAB V
PENUTUP

a. Catatan Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2024 ini merupakan dokumen yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2019–2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian agar Renja yang telah disusun ini dapat mencapai target sesuai sasaran antara lain:

- Perlunya dukungan anggaran sesuai kebutuhan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan;
- Dukungan sumber daya manusia yang profesional dan kompetensi;
- Sistem dan prosedur kerja yang konsisten, dinamis dan akuntabel.

b. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun ke-5 (kelima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 yang memuat Kerangka Kerja Tahunan Pemerintah Kota Tarakan beserta seluruh Perangkat Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 265 ayat(3) RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KUA serat PPAS dan Pasal 310 ayat (1) Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, dan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019 – 2024 .

Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PD Tahun 2024.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan Tahun 2024 memuat Program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta meningkatnya realisasi investasi di Kota Tarakan, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan;

2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini dengan sebaik – baiknya yang telah ditetapkan sesuai RPJMD Perubahan 2019 – 2024 ;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Penanaman Modal dan PTSP (R-APBD), Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang – Undang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar benar -benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Sementara terhadap permasalahan yang terjadi

pada pelaksanaannya agar dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi, dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat;
2. Memperbaiki sistem pengajuan anggaran setiap bidang dan seksi dengan metode anggaran berbasis kinerja (tidak hanya menghasilkan output namun juga menghasilkan outcome yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran);
3. Mengadakan koordinasi dan komunikasi secara intensif antar semua komponen di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik;
4. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. Melakukan monitoring perkembangan kegiatan dan pencapaian target baik dari sisi penyerapan anggaran maupun kualitas sasaran kegiatannya setiap triwulan.

Untuk mencapai visi dan misi KDH Kota Tarakan periode 2019 – 2024 yaitu Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju Dan Sejahtera Melalui Smart City**,** maka diharapkan dengan tersusunnya Renja Awal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Kota Tarakan.

Tarakan, Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP,

[illegible] E N G, SPt
PEMBINA TK. I/IVb
NIP.196906051998031014